



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH TAMANTIRTO

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR 02 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKalurahan, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan¹⁾, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759)
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Magement System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Dan Jasa Pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
39. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2018);

40. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
41. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);
42. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2020 Nomor 17);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan ,Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);

46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06).
49. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO

Dan

LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 KALURAHAN TAMANTIRTO.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Sebelumnya	Rp. 5.752.024.563,-
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 96.100.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.633.924.563,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 22.000.000,-

Sesudahnya	Rp. 5.428.474.623,-
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 104.691.060,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 5.299.783.563,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 24.000.000,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 3.135.609.291,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 2.630.826.008,-
Berlebih / berkurang *	: Rp. (504.783.283,-)

b. Bidang Pembangunan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 2.292.590.065,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 2.598.514.062,-
Berlebih / berkurang*	: Rp. 305.923.997,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

➤ Sebelumnya	: Rp. 574.256.805,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 462.108.065,-
Berlebih / berkurang	: Rp. (112.148.740,-)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

➤ Sebelumnya	: Rp. 428.744.490,-
➤ Sesudahnya	: Rp. 415.449.490,-
Berlebih/ berkurang	: Rp. (13.295.000,-)

e. Bidang Tak Terduga :

➤ Sebelumnya	: Rp 307.396.267,-
➤ Sesudahnya	: Rp 309.196.267,-
Berlebih / berkurang	: Rp 1.800.000,-

Jumlah Belanja Sebelumnya Rp. 6.738.596.918,-

Jumlah Belanja Sesudahnya Rp. 6.416.093.892,-

Berlebih/berkurang Rp (322.503.026,-)

3. Pembiayaan Kalurahan Sebelumnya

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 986.572.355,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 986.572.355,-

4. Pembiayaan Kalurahan Sesudahnya	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 987.619.269,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 987.619.269,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah Tamantirto menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamantirto.

Ditetapkan di Tamantirto
pada tanggal 1 Oktober 2024

LURAH TAMANTIRTO,

WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto
pada tanggal 1 Oktober 2024

Carik Tamantirto



LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2024 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL (13/Tamantirto/2024)

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.100.000,00	104.691.060,00	8.591.060,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.633.924.563,00	5.299.783.563,00	(334.141.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00	5.428.474.623,00	(323.549.940,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	1.502.184.143,00	1.474.752.143,00	(27.432.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.707.229.366,00	3.128.114.429,00	(579.114.937,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.221.787.142,00	1.504.031.053,00	282.243.911,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	307.396.267,00	309.196.267,00	1.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.738.596.918,00	6.416.093.892,00	(322.503.026,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(986.572.355,00)	(987.619.269,00)	(1.046.914,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	986.572.355,00	987.619.269,00	1.046.914,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	986.572.355,00	987.619.269,00	1.046.914,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	986.572.355,00	987.619.269,00	1.046.914,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA 3	MENJADI 4	BERKURANG (BERKURANG)	5	KETERANGAN
1	2					6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tambling, 01 October 2024
 LUPAH TAMANGIRTO
 WISNUARDI S H

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.			PENDAPATAN				
4.1.			Pendapatan Asli Desa	96.100.000,00	104.691.060,00	8.591.060,00	
4.1.1.			Hasil Usaha Desa	5.400.000,00	5.902.000,00	502.000,00	
4.1.2.			Hasil Aset Desa	90.700.000,00	98.789.060,00	8.089.060,00	
4.2.			Pendapatan Transfer	5.633.924.563,00	5.299.783.563,00	(334.141.000,00)	
4.2.1.			Dana Desa	1.934.978.000,00	1.934.978.000,00	0,00	
4.2.2.			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	804.337.963,00	804.337.963,00	0,00	
4.2.3.			Alokasi Dana Desa	1.428.700.000,00	1.428.700.000,00	0,00	
4.2.4.			Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.5.			Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.415.908.600,00	1.081.767.600,00	(334.141.000,00)	
4.3.			Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.6.			Bunga Bank	22.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	
			JUMLAH PENDAPATAN	5.752.024.563,00	5.428.474.623,00	(323.549.940,00)	
2.			BELANJA				
1.			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.135.609.291,00	2.630.826.008,00	(504.783.283,00)	
1.1			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.852.197.778,00	1.889.503.778,00	37.306.000,00	
1.1.01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.924.960,00	66.924.960,00	0,00	
1.1.01		5.1.	Belanja Pegawai	66.924.960,00	66.924.960,00	0,00	
1.1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	678.782.372,00	678.782.372,00	0,00	

KODE REK	2	3	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
1				4	5	6	7
1.1.02	5.1.		Belanja Pegawai	678.782.372,00	678.782.372,00	0,00	
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.532.000,00	11.532.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	11.532.000,00	11.532.000,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	217.203.635,00	260.786.635,00	43.583.000,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	217.203.635,00	260.786.635,00	43.583.000,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	132.300.000,00	132.300.000,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	19.360.000,00	22.115.000,00	2.755.000,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00	22.115.000,00	2.755.000,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	113.450.000,00	131.850.000,00	18.400.000,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00	131.850.000,00	18.400.000,00	
1.1.90			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuska dan LKK	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.		Belanja Pegawai	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	
1.1.92			Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bani	101.512.911,00	101.512.911,00	0,00	
1.1.92	5.1.		Belanja Pegawai	101.512.911,00	101.512.911,00	0,00	
1.1.93			Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Ba	100.770.300,00	72.006.300,00	(28.764.000,00)	
1.1.93	5.1.		Belanja Pegawai	100.770.300,00	72.006.300,00	(28.764.000,00)	
1.1.97			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	124.161.600,00	124.161.600,00	0,00	
1.1.97	5.1.		Belanja Pegawai	124.161.600,00	124.161.600,00	0,00	
1.1.98			Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honor	279.720.000,00	281.052.000,00	1.332.000,00	
1.1.98	5.1.		Belanja Pegawai	279.720.000,00	281.052.000,00	1.332.000,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	193.411.506,00	203.532.506,00	10.121.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.111.506,00	65.209.506,00	10.098.000,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	55.111.506,00	65.209.506,00	10.098.000,00	
1.2.02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.300.000,00	38.323.000,00	23.000,00	
1.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	32.473.000,00	173.000,00	
1.2.02	5.3.		Belanja Modal	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
1.2.03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	7
1.2.03	5.3.		Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	97.311.697,00	69.951.000,00	(27.360.697,00)	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.730.697,00	11.370.000,00	(27.360.697,00)	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	38.730.697,00	11.370.000,00	(27.360.697,00)	
1.3.03			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	
1.3.05			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	29.286.000,00	29.286.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	29.286.000,00	29.286.000,00	0,00	
1.3.90			Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya	23.635.000,00	23.635.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	23.635.000,00	23.635.000,00	0,00	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	748.424.000,00	214.584.000,00	(533.840.000,00)	
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.531.000,00	5.531.000,00	0,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R.	31.279.500,00	33.179.500,00	1.900.000,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	31.279.500,00	33.179.500,00	1.900.000,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	40.998.000,00	11.418.000,00	(29.580.000,00)	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	40.998.000,00	11.418.000,00	(29.580.000,00)	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	26.779.000,00	26.779.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.779.000,00	26.779.000,00	0,00	
1.4.06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	12.994.500,00	12.994.500,00	0,00	
1.4.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	12.994.500,00	12.994.500,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	20.352.000,00	12.017.000,00	(8.335.000,00)	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.352.000,00	12.017.000,00	(8.335.000,00)	
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.720.000,00	14.515.000,00	(13.205.000,00)	
1.4.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	14.515.000,00	(13.205.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan		527.755.000,00	4.210.000,00	(523.545.000,00)
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa		527.755.000,00	4.210.000,00	(523.545.000,00)
1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror		48.775.000,00	87.700.000,00	38.925.000,00
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa		48.775.000,00	87.700.000,00	38.925.000,00
1.4.94	Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan		6.240.000,00	6.240.000,00	0,00
1.4.94	Belanja Barang dan Jasa		6.240.000,00	6.240.000,00	0,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		244.264.310,00	253.254.724,00	8.990.414,00
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		100.452.619,00	106.459.119,00	6.006.500,00
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		100.452.619,00	106.459.119,00	6.006.500,00
1.5.90	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan		118.364.891,00	119.411.805,00	1.046.914,00
1.5.90	Belanja Modal		118.364.891,00	119.411.805,00	1.046.914,00
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan		12.391.800,00	14.328.800,00	1.937.000,00
1.5.91	Belanja Barang dan Jasa		12.391.800,00	14.328.800,00	1.937.000,00
1.5.99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan		13.055.000,00	13.055.000,00	0,00
1.5.99	Belanja Barang dan Jasa		13.055.000,00	13.055.000,00	0,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.292.590.065,00	2.598.514.062,00	305.923.997,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan		87.472.500,00	104.247.500,00	16.775.000,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (		19.724.000,00	36.499.000,00	16.775.000,00
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		19.724.000,00	36.499.000,00	16.775.000,00
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		45.173.390,00	45.173.390,00	0,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa		45.173.390,00	45.173.390,00	0,00
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat		7.329.610,00	7.329.610,00	0,00
2.1.06	Belanja Barang dan Jasa		7.329.610,00	7.329.610,00	0,00
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bat		4.053.500,00	4.053.500,00	0,00
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa		4.053.500,00	4.053.500,00	0,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		11.192.000,00	11.192.000,00	0,00
2.1.10	Belanja Barang dan Jasa		11.192.000,00	11.192.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
2.2	Sub Bidang Kesehatan		542.795.500,00	604.055.500,00	61.260.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsla, Insentif)		201.795.500,00	248.805.500,00	47.010.000,00
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		201.795.500,00	248.805.500,00	47.010.000,00
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao		40.170.000,00	40.170.000,00	0,00
2.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa		40.170.000,00	40.170.000,00	0,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		49.360.000,00	71.110.000,00	21.750.000,00
2.2.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa		49.360.000,00	71.110.000,00	21.750.000,00
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy		145.290.000,00	145.290.000,00	0,00
2.2.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa		145.290.000,00	145.290.000,00	0,00
2.2.92	Pembinaan Kampung KB		12.370.000,00	12.370.000,00	0,00
2.2.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa		12.370.000,00	12.370.000,00	0,00
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting		68.325.000,00	60.825.000,00	(7.500.000,00)
2.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa		68.325.000,00	60.825.000,00	(7.500.000,00)
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)		7.705.000,00	7.705.000,00	0,00
2.2.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa		7.705.000,00	7.705.000,00	0,00
2.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan		17.780.000,00	17.780.000,00	0,00
2.2.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa		17.780.000,00	17.780.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		847.441.760,00	863.041.760,00	15.600.000,00
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pari/Drainas		160.023.760,00	160.023.760,00	0,00
2.3.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		160.023.760,00	160.023.760,00	0,00
2.3.05	5.3. Belanja Modal		95.023.760,00	95.023.760,00	0,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen		631.333.000,00	654.933.000,00	23.600.000,00
2.3.11	5.2. Belanja Barang dan Jasa		390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
2.3.11	5.3. Belanja Modal		241.333.000,00	264.933.000,00	23.600.000,00
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.3.13	5.2. Belanja Barang dan Jasa		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		16.085.000,00	8.085.000,00	(8.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.3.18	5.2.	16.085.000,00	8.085.000,00	(8.000.000,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>237.746.540,00</u>	<u>238.571.540,00</u>	<u>825.000,00</u>	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	<u>175.884.000,00</u>	<u>175.884.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	175.884.000,00	175.884.000,00	0,00	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi/ Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P.	<u>40.000.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.05	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	<u>13.625.040,00</u>	<u>13.625.040,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.10	Belanja Modal	13.625.040,00	13.625.040,00	0,00	
2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	<u>8.237.500,00</u>	<u>9.062.500,00</u>	<u>825.000,00</u>	
2.4.17	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	775.000,00	0,00	
2.4.17	Belanja Modal	7.462.500,00	8.287.500,00	825.000,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>386.198.365,00</u>	<u>597.662.362,00</u>	<u>211.463.997,00</u>	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	<u>11.055.000,00</u>	<u>161.931.817,00</u>	<u>150.876.817,00</u>	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	
2.5.02	Belanja Modal	10.505.000,00	161.381.817,00	150.876.817,00	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	<u>30.818.365,00</u>	<u>14.043.365,00</u>	<u>(16.775.000,00)</u>	
2.5.03	Belanja Barang dan Jasa	30.818.365,00	14.043.365,00	(16.775.000,00)	
2.5.90	Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	<u>48.342.000,00</u>	<u>125.704.180,00</u>	<u>77.362.180,00</u>	
2.5.90	Belanja Barang dan Jasa	959.000,00	959.000,00	0,00	
2.5.90	Belanja Modal	47.383.000,00	124.745.180,00	77.362.180,00	
2.5.91	Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	<u>258.983.000,00</u>	<u>258.983.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.91	Belanja Barang dan Jasa	258.983.000,00	258.983.000,00	0,00	
2.5.92	Pengembangan Tanaman Hias/ Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarar	<u>37.000.000,00</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.92	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>186.785.400,00</u>	<u>186.785.400,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	<u>30.487.000,00</u>	<u>30.487.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	1	2	URAIAN 3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA 4	MENJADI 5		
2.6.01	5.3.		Belanja Modal	30.487.000,00	30.487.000,00	0,00	7
2.6.05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Tr.	156.298.400,00	156.298.400,00	0,00	
2.6.05	5.3.		Belanja Modal	156.298.400,00	156.298.400,00	0,00	
2.8			Sub Bidang Pariwisata	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.8.03			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	
3.			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	574.256.805,00	462.108.065,00	(112.148.740,00)	
3.1			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	101.259.100,00	100.359.100,00	(900.000,00)	
3.1.01			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.1.03			Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	58.695.000,00	66.145.000,00	7.450.000,00	
3.1.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	58.695.000,00	66.145.000,00	7.450.000,00	
3.1.07			Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	
3.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	
3.1.92			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana.	37.764.100,00	26.404.100,00	(11.360.000,00)	
3.1.92	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	34.214.100,00	24.354.100,00	(9.860.000,00)	
3.1.92	5.3.		Belanja Modal	3.550.000,00	2.050.000,00	(1.500.000,00)	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	325.737.705,00	206.436.405,00	(119.301.300,00)	
3.2.02			Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	10.810.000,00	8.810.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.810.000,00	8.810.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	107.981.300,00	6.075.000,00	(101.906.300,00)	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	107.981.300,00	6.075.000,00	(101.906.300,00)	
3.2.04			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan I	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
3.2.05			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kea	158.763.905,00	158.763.905,00	0,00	
3.2.05	5.3.		Belanja Modal	158.763.905,00	158.763.905,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MEJADI		
			3	4	5	6	7
3.2.90			Pembinaan Bidang Keagamaan	35.785.000,00	15.740.000,00	(20.045.000,00)	
3.2.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	35.785.000,00	15.740.000,00	(20.045.000,00)	
3.2.91			Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	7.897.500,00	12.547.500,00	4.650.000,00	
3.2.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.897.500,00	12.547.500,00	4.650.000,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	76.770.000,00	68.337.500,00	(8.432.500,00)	
3.3.03			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50.120.000,00	25.775.000,00	(24.345.000,00)	
3.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	50.120.000,00	25.775.000,00	(24.345.000,00)	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	26.650.000,00	42.562.500,00	15.912.500,00	
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	42.562.500,00	15.912.500,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.490.000,00	86.975.050,00	16.485.050,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	3.735.000,00	3.735.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	25.735.000,00	31.730.000,00	5.995.000,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	25.735.000,00	31.730.000,00	5.995.000,00	
3.4.90			Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	36.290.000,00	46.780.060,00	10.490.060,00	
3.4.90	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	36.290.000,00	44.195.060,00	7.905.060,00	
3.4.90	5.3.		Belanja Modal	0,00	2.585.000,00	2.585.000,00	
3.4.93			Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	
3.4.93	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	428.744.490,00	415.449.490,00	(13.295.000,00)	
4.1			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
4.1.05			Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	259.960.140,00	265.135.140,00	5.175.000,00	
4.2.04			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.252.000,00	35.752.000,00	17.500.000,00	
4.2.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	332.500,00	332.500,00	0,00	

KODE REK	1	2	3	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
					SEMULA	MENJADI		
4.2.04	5.3.			Belanja Modal	17.919.500,00	35.419.500,00	17.500.000,00	7
4.2.05				Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.141.000,00	3.141.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	3.141.000,00	3.141.000,00	0,00	
4.2.06				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	162.269.640,00	162.269.640,00	0,00	
4.2.06	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.			Belanja Modal	159.959.640,00	159.959.640,00	0,00	
4.2.90				Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan	63.477.500,00	51.152.500,00	(12.325.000,00)	
4.2.90	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	63.477.500,00	51.152.500,00	(12.325.000,00)	
4.2.99				Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	
4.2.99	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	
4.3				Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	50.000.000,00	31.190.000,00	(18.810.000,00)	
4.3.02				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	50.000.000,00	31.190.000,00	(18.810.000,00)	
4.3.02	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	31.190.000,00	(18.810.000,00)	
4.4				Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.4.94				Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.4.94	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	
4.5				Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	79.609.350,00	79.609.350,00	0,00	
4.5.02				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	52.830.000,00	52.830.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	52.830.000,00	0,00	
4.5.90				Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan	26.779.350,00	26.779.350,00	0,00	
4.5.90	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	26.779.350,00	26.779.350,00	0,00	
4.6				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.520.000,00	6.520.000,00	340.000,00	
4.6.02				Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.520.000,00	6.520.000,00	340.000,00	
4.6.02	5.2.			Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	6.520.000,00	340.000,00	
4.7				Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
4.7.04				Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		PERTAMBAH (DEKURITASI)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEMJADI		
1	2	3	4	5	7
4.7.04	5.2.		19.300.000,00	0,00	
5.			309.196.267,00	1.800.000,00	
5.1	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		85.000.000,00	0,00	
5.1.00	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		85.000.000,00	0,00	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		85.000.000,00	0,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		85.000.000,00	0,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		17.196.267,00	0,00	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat		17.196.267,00	0,00	
5.2.00	Belanja Tidak Terduga		17.196.267,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		207.000.000,00	1.800.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		207.000.000,00	1.800.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		207.000.000,00	1.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA		6.738.596.918,00	(322.503.025,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)		(987.619.259,00)	(1.048.314,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		987.619.259,00	1.048.314,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya		987.619.259,00	1.048.314,00	
	PEMBIAYAAN NETTO		987.619.259,00	1.048.314,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	

Tamandiri, 01 October 2024

LURAH TAWANTIRTO

WISNUARDISYAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦧꦸꦁꦏꦺꦴꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦱꦤꦶꦁꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181

Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

Email: kec.kasihan@bantulkab.go.id, Website: https://kec-kasihan.bantulkab.go.id

Bantul, 11 September 2024

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Kab. Bantul
2. Kepala DPMKas Kab. Bantul
3. Kabag Hukum Setda Kab. Bantul
4. Lurah.....Taman Tirto.....
5. Bamuskal

di -

Bantul

Surat Pengantar

Nomor : B/400.10.2.2/00608

No	Hal yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa
2.	Keputusan Panewu Kasihan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	1 bendel	

Panewu Kasihan,



SUBARTA, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196609271986081001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀

Alamat : Jl. Madukismo No 252 Tirtonirmolo Kasihan Bantul 55181.
Telp. (0274) 377597, Fax. (0274) 411275
Email : kec.kasihan@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN

NOMOR : 56 Tahun 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU KASIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, wajib dimintakan evaluasi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kapanewon Kasihan tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
24. Perbup Bantul No. 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

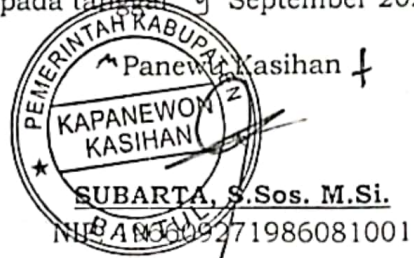
Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah Tamantirto bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 9 September 2024



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

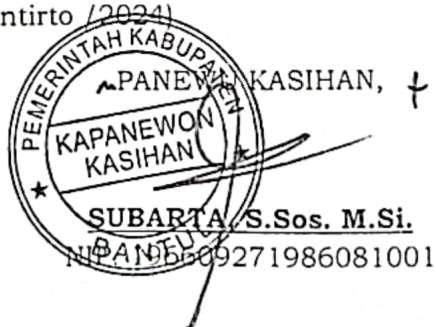
1. Inspektur Kabupaten Bantul
2. Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul
4. Bamuskal Tamantirto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU KASIHAN
NOMOR : 56 TAHUN 2024
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2024

TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.
 - A. Legal Drafting
Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
 - B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.
 1. Judul, dan pasal-pasal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada lampiran F.1
 2. Dasar hukum sudah sesuai
 3. Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 substansi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Rincian Pendapatan dan belanja pada lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah sesuai.
 - C. Nomor Register Peraturan Kalurahan
Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul (/ Tamantirto / 2024)



**CEKLIST EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PERUBAHAN APBDAL TAHUN 2024
KALURAHAN TAMANTIRTO**

NO.	URAIAN	KETERANGAN
A. Legal Drafting		
1	Penggunaan huruf "bookman old style" ukuran huruf 12 dengan jarak baris 1,5	Sudah
2	Kop Perdes dengan lambang Garuda cetakan warna emas	Sudah
3	Nomor register Kapanewon	
	Kesesuaian Dasar Hukum :	
4	UU No 13 tahun 2021 tentang Keistimewaan DIY	Sudah
5	UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa beserta perubahannya	Sudah
6	PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no 6 th 2014	Sudah
7	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Sudah
8	Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa	Sudah
9	Permendagri No 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa	Sudah
10	Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sudah
11	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan PMK No 98/2023	Sudah
12	Permendes PDDT No 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Sudah
13	Permendes PDDT No 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	Sudah
14	Permendes PDDT No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024	Sudah
15	Peraturan Gubernur DIY No. 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan Tanah Kalurahan	Sudah
16	Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2020 tentang pedoman pemerintah kalurahan	Sudah
17	Perda Kab Bantul No 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan	Sudah
18	Perda Kab Bantul No 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan	Sudah
19	Perda Kab Bantul No 8 Tahun 2020 tentang Bamuskal	Sudah
20	Peraturan Bupati Bantul No 76 Tahun 2019 tentang Siklus tahunan Desa	Sudah
21	Perbup Bantul No 134 Tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan kal. Sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bantul No. 128 Tahun 2020	Sudah
22	Peraturan Bupati Bantul No. 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan	Sudah
23	Peraturan Bupati Bantul No 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan produk hukum kalurahan	Sudah
24	Peraturan Bupati Bantul No 134 Tahun 2020 tentang tata naskah dinas bagi pemerintah kalurahan	Sudah
25	Perbup Bantul No. 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorir Kalurahan dan Bamuskal	Sudah
26	Peraturan Bupati Bantul No 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan desa	Sudah
27	Peraturan Bupati Bantul No 60 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di kalurahan	Sudah
28	Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Sudah
29	Perbup Bantul No. 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan	Sudah
30	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024	Sudah
31	Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Sudah
32	Peraturan Kal. pemanfaatan tanah Kal.	Sudah
33	Peraturan Kal. pungutan Kal.	Sudah
34	Peraturan Kal. kewenangan kalurahan	Sudah
35	Peraturan Kal. susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kalurahan	Sudah
36	Peraturan Kal tentang RPJMKal	Sudah
37	Peraturan Kal tentang RKP kal. 2024	Sudah
38	Peraturan Kal tentang Siltap	Sudah
B. Substansi		
1	Kesesuaian jumlah Dana Transfer	Sudah
2	Prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa utk Pembangunan & Pemberdayaan DD tidak diperkenankan untuk membangun gedung/kantor	Sudah
3	Siltap, Tunjangan Lurah/Pamong, Tunjangan Bamuskal, Operasional kalurahan/Bamuskal, Insentif RT ≤ 30 % APBKal	Sudah
4	Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada didalam sistem keuangan desa sesuai Permendagri 20 Tahun 2018	Sudah
5	BLT DD maksimal 25%, KETAHANAN PANGAN minimal 20% dari pagu DD murni 2023	Sudah
C. Persyaratan Kelengkapan Tambahan		
	Keputusan Hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal	
1	APBKal (lihat tanggal keputusan)	Sudah

NO	URAIAN	KETERANGAN	
2	Keputusan hasil musyawarah BAMUSKAL pembahasan dan penyepakatan raperkal APBKal (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Sudah	
3	Peraturan Kal tentang RPJMKal	Sudah	
4	Peraturan Kal tentang RKP kal 2024	Sudah	
Catatan: Rancangan Perkal APBKal ini harus diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi dari: A. Kapanewon kemudian dimintakan nomor register B. agar dipublikasikan melalui SID dan JDIH Kabupaten Bantul			





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO**

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀ꦧꦢꦤꦥꦺꦫꦩꦸꦱꦶꦮꦂꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦩꦤꦠꦶꦂꦠꦺ

Jl. Kasihan-Bibis No 01 Telp 0274-370201 Kode Pos 55183

Website: tamantirto.bantulkab.go.id, e-mail: desa.tamantirto@bantulkab.go.id

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2024**

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBKal, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan kurangnya anggaran digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*), maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tamantirto tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);

36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Dan Jasa Pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
40. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
41. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa , Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 10 Tahun 2019);
42. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

43. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
44. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
45. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 17);
46. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);
47. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 06);
48. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tamantirto
Pada tanggal : 5 September 2024

Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto

Ketua



(SURANTO)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis, Tanggal Lima, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Suranto

Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Tamantirto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Wisnu Ardi

Jabatan : Lurah Tamantirto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tamantirto selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan Tamantirto Tentang Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
2. Apabila dikemudian hari terdapat Devisit Anggaran maka wewenang penuh berada di Pemerintah Kalurahan Tamantirto.
3. Kepada Pemerintah Kalurahan untuk segera memohonkan Evaluasi Peraturan Kalurahan Kepada Kapanewon Kasihan.
4. Setelah Mendapatkan Evaluasi untuk segera Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tentang Perubahan Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH TAMANTIRTO

WISNU ARDI

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL

SURANTO